

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian, maka peneliti memberikan kuesioner terhadap DPRD Se-Yogyakarta yang wilayahnya terbagi menjadi lima yaitu Kota, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Pada kenyataannya tidak semua kuesioner yang dibagikan kembali atau terisi dengan lengkap sehingga dari 50 kuesioner yang dibagikan, hanya 32 kuesioner saja yang terisi dengan lengkap dan dapat dianalisis. Berikut uraiannya:

Tabel 4.1
Kuesioner yang Diolah

Wilayah	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Kuesioner Tidak Lengkap	Kuesioner Dapat Diolah
Kota	10	8	1	7
Bantul	10	7	-	7
Sleman	10	6	1	5
Kulon Progo	10	6	-	6
Gunung Kidul	10	7	-	7
Total	50	34	2	32

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kuesioner yang peneliti berikan sebanyak 50 kuesioner, yang kembali sebanyak 34 kuesioner dengan rincian 8 kuesioner dari DPRD Kota, 7 kuesioner dari DPRD Bantul, 6 kuesioner dari DPRD Sleman, 6 kuesioner dari DPRD Kulon Progo, dan 7

kuesioner dari DPRD Gunung Kidul. Terdapat 2 kuesioer yang tidak lengkap sehingga dari 34 kuesioner yang dapat dianalisis hanya 32 kuesioner saja.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis ini terdiri dari analisis karakteristik responden.

1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Penelitian ini tidak ditujukan untuk mencari perbedaan antara perempuan dan laki-laki sehingga komposisi antara perempuan dan laki-laki tidak harus sama. Hasil penelitian menjelaskan bahwa distribusi frekuensi data seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	6	18,75%
Laki-laki	26	81,25%
Total	32	100%

Berdasarkan tabel di tersebut dapat diketahui bahwa jumlah subjek laki-laki lebih banyak dibandingkan subjek perempuan. Kondisi ini merupakan hal yang wajar karena pada kenyataannya jumlah anggota DPRD Se-Yogyakarta memang lebih banyak jumlah laki-laknya dibandingkan perempuan.

2. Usia Responden

Karakteristik yang kedua dari responden adalah usia. Karakteristik usia dalam penelitian ini dibedakan menjadi usia ≤ 30 tahun, 31–40 tahun, 41–50 tahun, dan ≥ 51 tahun. Tabel 4.3 menunjukkan usia responden.

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 30 tahun	2	6,25%
31 – 40 tahun	11	34,38%
41 – 50 tahun	18	56,25%
≥ 51 tahun	1	3,12%
Total	32	100%

Berdasarkan uraian tabel tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas subjek berusia 41 hingga 50 tahun (56,25%). Subjek yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 2 orang (6,25%), berusia 31-40 tahun sejumlah 11 orang (34,38%), dan yang usianya lebih dari 51 tahun sebanyak 1 orang (3,12%).

3. Pendidikan Responden

Karakteristik yang selanjutnya akan dibahas adalah tentang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden. Pendidikan terakhir para responden terurai dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	1	3,12%
SMK	-	-
D1/D2/D3	-	-
S1	25	78,13%
S2	5	15,63%
S3	1	3,12%
Total	32	100%

Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir yang dimiliki responden mayoritas adalah S1 yaitu sebanyak 25 orang (78,13%). Subjek yang pendidikan SMA sebanyak 1 orang (3,12%), S2 sejumlah 5 orang (15,63%) sedangkan yang pendidikan terakhirnya S3 sebanyak 1 orang (3,12%).

4. Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah merupakan hal yang penting karena memberikan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan keuangan daerah. Jumlah keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Keikutsertaan dalam Pendidikan Pelatihan tentang Keuangan Daerah	Jumlah	Persentase
Belum pernah	5	15,63%
1 kali	25	78,13%
2-3 kali	1	3,12%
4 kali atau lebih	1	3,12%
Total	32	100%

Uraian dari tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah sejumlah 1 kali.

5. Pengalaman Politik Responden

Pengalaman politik yang dimiliki responden penulis uraikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Politik

Pengalaman Politik	Jumlah	Persentase
< 2 tahun	2	6,25%
2 – 5 tahun	5	15,63%
> 5 tahun	25	78,12%
Total	32	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi responden berdasarkan pengalaman politik paling dominan selama > 5 tahun sebanyak 25 responden (78,12%).

6. Pengalaman sebagai Anggota DPR/DPRD

Pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman
sebagai Anggota DPR/DPRD

Pengalaman sebagai Anggota DPR/DPRD	Jumlah	Persentase
Satu periode	9	28,12%
Dua periode	21	65,63%
Lebih dari dua periode	2	6,25%
Total	32	100%

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pengalaman yang sebagai anggota DPR/DPRD yang dimiliki oleh responden paling banyak adalah dua periode. Jumlah responden yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD satu periode sebanyak 9 orang (28,12%), dua periode sejumlah 21 orang (65,63%), serta lebih dari dua periode sebanyak 2 orang (6,25%).

7. Komisi

Penggolongan komisi yang dimiliki responden dalam penelitian ini terurai dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Klasifikasi Responden Berdasarkan Komisi

Komisi	Jumlah	Persentase
Komisi Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Keuangan Daerah	26	81,25%
Panitia Anggaran	6	18,75%
Total	32	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang masuk dalam kategori komisi perekonomian, keuangan dan pengawasan keuangan daerah sebanyak 26 orang (81,25%) serta panitia anggaran sejumlah 6 orang (18,75%).

B. Uji Validitas Data

Hasil pengujian uji validitas instrumen pertanyaan variabel Komitmen Politik (X₁) sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Variabel Komitmen Politik (X₁)

Variabel	Item	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Komitmen Politik (X ₁)	X1.1	0,441	Valid
	X1.2	0,500	Valid
	X1.3	0,516	Valid
	X1.4	0,789	Valid
	X1.5	0,556	Valid
	X1.6	0,357	Valid

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai corrected item-total correlation pada masing-masing pertanyaan pada variabel Komitmen Politik (X₁) nilainya > 0,3.

Hasil pengujian uji validitas instrumen pertanyaan variabel Gaya Kepemimpinan (X₂) sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Variabel Gaya Kepemimpinan (X₂)

Variabel	Item	Pearson correlation	Keterangan
Gaya Kepemimpinan (X ₂)	X2.1	0,388	Valid
	X2.2	0,477	Valid
	X2.3	0,502	Valid
	X2.4	0,658	Valid
	X2.5	0,315	Valid
	X2.6	0,446	Valid

Sumber: lampiran 2

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai corrected item-total correlation pada masing-masing pertanyaan pada variabel Gaya Kepemimpinan (X₂) nilainya > 0,3.

Hasil pengujian uji validitas instrumen pertanyaan variabel Budaya Organisasi (X₃) sebagai berikut:

Tabel 4.11
Rangkuman hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Variabel Budaya Organisasi (X₃)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
Budaya Organisasi	X3.1	0,376	Valid
	X3.2	0,645	Valid
	X3.3	0,301	Valid
	X3.4	0,405	Valid
	X3.5	0,460	Valid
	X3.6	0,386	Valid

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai corrected item-total correlation

pada masing-masing pertanyaan pada variabel Budaya Organisasi (X_3) nilainya $> 0,3$.

Hasil pengujian uji validitas instrumen pertanyaan variabel *independency* (X_4) sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rangkuman Hasil uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Variabel *Independency* (X_4)

Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
<i>Independency</i> (X_4)	X4.1	0,436	Valid
	X4.2	0,395	Valid
	X4.3	0,623	Valid
	X4.4	0,314	Valid
	X4.5	0,548	Valid
	X4.6	0,328	Valid

Sumber: lampiran 4

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *corrected item-total correlation* pada masing-masing pertanyaan pada variabel *independency* (X_4) nilainya $> 0,3$.

Hasil pengujian uji validitas instrumen pertanyaan variabel Pengawasan (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan
Variabel Pengawasan (Y)

Variabel	Item	Pearson correlation	Keterangan
Pengawasan (Y)	Y.1	0,470	Valid
	Y.2	0,334	Valid
	Y.3	0,595	Valid
	Y.4	0,548	Valid
	Y.5	0,645	Valid
	Y.6	0,689	Valid
	Y.7	0,645	Valid
	Y.8	0,454	Valid
	Y.9	0,758	Valid
	Y.10	0,444	Valid
	Y.11	0,529	Valid
	Y.12	0,390	Valid
	Y.13	0,613	Valid
	Y.14	0,560	Valid
	Y.15	0,601	Valid
	Y.16	0,336	Valid

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai corrected item-total correlation pada masing-masing pertanyaan pada variabel pengawasan (Y) nilainya $> 0,3$.

Hasil uji reliabilitas pertanyaan tentang variabel penelitian dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Status
Komitmen Politik	0,777	Handal
Gaya Kepemimpinan	0,724	Handal
Budaya Organisasi	0,695	Handal
Independency	0,709	Handal
Pengawasan	0,881	Handal

Sumber: lampiran 6

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada masing-masing variabel nilainya $> 0,6$. Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Nunnally, semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

C. Hasil Penelitian

1. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Distribusi sebaran yang normal memiliki arti bahwa penelitian tergolong representatif atau dapat mewakili populasi yang ada, sebaliknya apabila sebaran tersebut tidak normal, maka disimpulkan bahwa subjek penelitian itu tidak representatif atau tidak dapat mewakili keadaan populasi yang sebenarnya sehingga hasilnya tidak layak untuk digeneralisasikan pada populasi tersebut. Uji normalitas sebaran bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya distribusi sebaran jawaban subjek pada suatu variabel yang dianalisis, dengan kata lain bahwa uji normalitas dilakukan untuk menguji hipotesis nihil (H_0) bahwa tidak ada perbedaan antara distribusi sebaran skor subjek sampel penelitian dan distribusi sebaran skor subjek pada populasi penelitian.

Hasil uji normalitas dengan teknik *one sample Kolmogorov Smimov* menunjukkan bahwa data yang dianalisis sebarannya adalah normal.

Variabel komitmen politik (X_1) memiliki nilai sebesar $K-SZ = 1,048$ dengan $p = 0,222$ ($p > 0.05$). Berkaitan dengan gaya kepemimpinan (X_2) diperoleh nilai $K-SZ = 0,559$ dengan $p = 0,914$ ($p > 0.050$). Skor $K-SZ$ untuk variabel budaya organisasi (X_3) sebesar $0,610$ dengan $p = 0,850$ ($p > 0.050$). Variabel *independency* (X_4) memiliki nilai $K-SZ$ sebesar $0,681$ dengan $p = 0,742$ ($p > 0.050$).

Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel memiliki sebaran yang normal. Rincian hasil uji coba normalitas sebaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Uji Normalitas Sebaran

Variabel	SD	K-SZ	P
Komitmen Politik	4,809	1,048	0,222
Gaya Kepemimpinan	4,299	0,559	0,914
Budaya Organisasi	4,366	0,610	0,850
<i>Independency</i>	4,087	0,829	0,497
Pengawasan	16,302	0,681	0,742

b. Uji Linieritas

Uji linieritas merupakan pengujian garis regresi antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Tujuan dari linieritas penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Suatu hubungan dapat dikatakan linier apabila sebaran nilai variabel-variabel penelitian ini berada dalam satu garis lurus.

Uji linieritas diperoleh hasil bahwa hubungan antara variabel komitmen politik dan pengawasan adalah dengan nilai F sebesar $20,526$ dengan $p = 0,000$ ($p < 0.050$), dengan hasil ini maka hubungan kedua

variabel adalah linier. Uji linieritas diperoleh hasil bahwa hubungan antara variabel gaya kepemimpinan dan pengawasan adalah dengan nilai F sebesar 36, 711 dengan $p = 0,000$ ($p < 0.050$), dengan hasil ini maka hubungan kedua variabel adalah linier.

Uji linieritas diperoleh hasil bahwa hubungan antara variabel budaya organisasi dan pengawasan adalah dengan nilai F sebesar 24,063 dengan $p = 0,000$ ($p < 0.050$), dengan hasil ini maka hubungan kedua variabel adalah linier. Uji linieritas diperoleh hasil bahwa hubungan antara variabel *independency* dan pengawasan adalah dengan nilai F sebesar 42,090 dengan $p = 0,000$ ($p < 0.050$), dengan hasil ini maka hubungan kedua variabel adalah linier.

2. Uji Hipotesis

Analisis kuantitatif biasanya digunakan untuk menganalisis suatu masalah agar dapat memberikan gambaran secara kongkrit sehingga keputusan dapat diambil secara lebih pasti. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Analisis regresi dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Model regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen politik (X_1), gaya kepemimpinan (X_2), budaya organisasi (X_3), dan *independency* (X_4) secara serentak terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Pada penelitian ini, dalam menganalisis regresi berganda penulis menggunakan seri program statistik SPSS versi 16. Hasil estimasi regresi dengan menggunakan SPSS 16 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	t tabel (DF=4)	Sig-t	Beta
Konstanta	21,431				
Komunikasi Politik	1,609	3,866	0	0,047	0,475
Gaya Kepemimpinan	2,085	5,016	0	0,006	0,550
Budaya Organisasi	1,889	3,936	0	0,026	0,506
<i>Independency</i>	1,410	3,798	0	0,048	0,353
Multiple R					0,844
R Square					0,713
F hitung					16,760
Sig F					0,000

Pada Tabel 4.10 tersebut perhitungan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 16 didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 21,431 + 1,609X_1 + 2,085X_2 + 1,889X_3 + 1,410X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +21,431 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari komitmen politik (X_1), gaya kepemimpinan (X_2), budaya organisasi (X_3), dan *independency* (X_4) responden tetap ada. Koefisien regresi komitmen politik (X_1) sebesar 1,609 dengan arah + (positif). Artinya jika komitmen politik ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan

sebaliknya jika komitmen politik diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Koefisien regresi gaya kepemimpinan (X_2) sebesar 2,085 dengan arah + (positif). Artinya jika gaya kepemimpinan ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika gaya kepemimpinan diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Koefisien regresi budaya organisasi (X_3) sebesar 1,889 dengan arah + (positif). Artinya jika budaya organisasi ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika budaya organisasi diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Koefisien regresi *independency* (X_4) sebesar 1,410 dengan arah + (positif). Artinya jika *independency* ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika *independency* diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan terdapat pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Regresi untuk pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,183 + 0,812X$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +9,183 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan dewan tentang anggaran, responden tetap ada. Koefisien regresi pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,812 dengan arah + (positif). Artinya jika pengetahuan dewan tentang anggaran ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika pengetahuan dewan tentang anggaran diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Regresi untuk komitmen politik terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), adalah sebagai berikut:

$$Y = 10,990 + 2,161X_1$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +10,990 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari komitmen politik, responden tetap ada. Koefisien regresi komitmen politik sebesar 2,161 dengan arah + (positif). Artinya jika komitmen politik ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika komitmen politik diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Regresi untuk gaya kepemimpinan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,601 + 2,813X_2$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +4,601 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari gaya kepemimpinan, responden tetap ada. Koefisien regresi gaya kepemimpinan sebesar 2,813 dengan arah + (positif). Artinya jika gaya kepemimpinan ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika gaya kepemimpinan diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Regresi untuk budaya organisasi terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,274 + 2,491X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +3,274 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari budaya organisasi, responden tetap ada. Koefisien regresi budaya organisasi sebesar 2,491 dengan arah + (positif). Artinya jika budaya organisasi ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika budaya organisasi diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Regresi untuk *independency* terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,422 + 3,048X_4$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar +5,422 yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas yang terdiri dari *independency*, responden tetap ada. Koefisien regresi *independency* sebesar 3,048 dengan arah + (positif). Artinya jika *independency* ditingkatkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin besar dan sebaliknya jika *independency* diturunkan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) akan semakin kecil.

Hipotesis kedua menyatakan komitmen politik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

$$Y = 13,439 + 1,467X + 2,436X_1 + 0,752 + e$$

P value = 0,010 membuktikan interaksi antara komitmen politik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen politik sebesar +0,752 menjadikan hipotesis dua penelitian ini diterima.

Hipotesis ketiga menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

$$Y = 9,321 + 1,675X + 1,003X_2 + 0,217 + e$$

P value = 0,003 membuktikan interaksi antara gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan gaya kepemimpinan sebesar +0,217 menjadikan hipotesis dua penelitian ini diterima.

Hipotesis keempat menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

$$Y = 10,070 + 1,345X + 1,095X_3 + 0,304 + e$$

P value = 0,018 membuktikan interaksi antara budaya organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan budaya organisasi sebesar +0,304 menjadikan hipotesis dua penelitian ini diterima.

Hipotesis kelima menyatakan *independency* berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

$$Y = 11,147 + 1,101X + 2,145X_4 + 0,256 + e$$

P value = 0,016 membuktikan interaksi antara *independency* berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang

anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan *independency* sebesar +0,256 menjadikan hipotesis dua penelitian ini diterima.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada APBD. Pengetahuan dewan utamanya tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan. DPRD sebagai pengawas tentu saja dituntut untuk mengawasi penggunaan APBD secara benar.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komitmen politik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Meyer *et al.*, dalam Wati dkk (2010) menjelaskan bahwa derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu. Karenanya komitmen organisasi ditandai dengan tiga hal yaitu: (1) Suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi (2) Keinginan yang kuat untuk

memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi dan (3) Kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) nampak saling mendukung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi terhadap Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang ada dapat dilihat dari nilai R Square yang diperoleh yaitu sebesar 17,8%.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Gaya kepemimpinan yang dirasakan anggota DPRD tentu akan mempengaruhi perilakunya. Gaya kepemimpinan yang ada dapat membuat DPRD menyesuaikan diri perilakunya dalam melaksanakan pengawasan pada APBD. Menurut Stogdill (Yukl, 2004), kepemimpinan didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan, peran tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Membentuk budaya organisasi menurut Riani (2011), prosesnya dimulai dari tahap pembentukan

ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Pada saat para pendiri organisasi memiliki ide untuk mendirikan organisasi, maka budaya organisasi pasti akan ikut terpikirkan meskipun masih secara eksplisit. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika organisasi sudah benar-benar berdiri.

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *independency* berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Seorang anggota DPRD tentu saja dituntut untuk mewakili masyarakat sehingga harus independent dalam melakukan pengawasan pada APBD.

Penelitian ini hanya meneliti anggota DPRD se-DIY, tidak melakukannya di propinsi lain, sehingga peneliti tidak mempunyai data yang dapat digunakan sebagai pembandingan antara komitmen politik, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, *independency*, serta pengawasan dewan pada keuangan daerah di propinsi lain. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan peneliti. Sebenarnya, apabila penelitian ini selain meneliti anggota DPRD se-DIY juga meneliti anggota DPRD di propinsi lain, tentu akan semakin menarik karena akan semakin luas pembahasannya dan dapat diketahui perbedaan komitmen politik, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, *independency*, serta pengawasan dewan pada keuangan daerah di DIY dan propinsi lain.